BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang (Permasalahan)

Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia. Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara. Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Provinsi Bangka Blitung dan Jambi di selatan. Di sebelah barat adalah Singapura, Malaysia dan Riau. Ibukota Kepulauan Riau adalah Tanjung Pinang.

Kepulauan Riau yang hampir 96% perairannya merupakan salah satu wilayah laut dan prioritas laut. Kepulauan Riau tersebar luas di laut dan air, terutama karena secara alami menghasilkan sumber daya alam dari laut dan perlu dikelola dengan baik.

Laut adalah sumber protein terpenting bagi manusia. Ini bertindak sebagai penghubung antara benua, pantai dan zona iklim dan dapat menyebarkan banyak panas ke seluruh dunia. Peran laut begitu besar sehingga perlu dikelola dengan baik. Lingkungan laut harus dikelola dalam paradigma pembangunan berkelanjutanSampah laut merupakan masalah lingkungan global dan domestik yang utama dan merupakan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati laut dan pesisir. Ada juga konsekuensi sosial ekonomi yang dapat disebabkan oleh masalah sampah laut dan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan. Sampah laut dapat mempengaruhi sumber daya yang penting secara ekonomi. Sebagian besar sampah laut terdiri dari plastik yang sangat tahan dalam berbagai bentuk dan mengandung

bahan kimia beracun, beberapa di antaranya ditemukan di laut lepas. Pada dasarnya, ketika plastik terurai, menghasilkan sejumlah besar partikel mikroplastik yang mempengaruhi kehidupan laut. Produksi plastik telah sangat tinggi sejak tahun 1950-an dan akan terus tumbuh dalam beberapa dekade mendatang.

Dilansir dari (National Oceanic and Atmospheric Administration Marine Debris Program, 2016), Sampah laut didefinisikan sebagai padatan permanen yang diproduksi atau diproses, dibuang atau dibuang di lingkungan laut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja atau tidak sengaja. Atau laut. Sampah laut dapat melukai atau membunuh hewan laut dan pantai. Ini menghancurkan dan mendegradasi habitat. Mempengaruhi keselamatan navigasi. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi industri perikanan dan pelayaran. Ini mengurangi kualitas hidup di wilayah pesisir. Ini mengancam kesehatan dan keselamatan manusia. Dikutip dari akun Instagram WWF Indonesia (World Wide Fund for Nature) diambi; dari :

https://www.instagram.com/p/CU4w0GNBU1e/?utm_medium=copy_link

LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mencatat bahwa Indonesia menyumbang sampah laut sebanyak sebesar 270 ribu - 590 ribu ton setiap tahunnya, dan 60-80 persen di antaranya merupakan sampah plastik. Sampah plastik sangat berbahaya karena dapat mengganggu ekosistem laut, mengontaminasi biota laut, mengganggu aktivitas nelayan, dan aktivitas wisata. Sampah plastik yang mencemari laut juga lambat laun akan hancur dan membentuk partikel mikro plastik, yang sangat berbahaya jika termakan oleh ikan laut, dan pada akhirnya dikonsumsi oleh kita.

Menjawab situasi tersebut, tahun 2018 WWF memulai inisiatif NO PLASTIC IN NATURE di tingkat global, yang bertujuan mengurangi kebocoran

limbah plastik ke alam, dengan visi mencapai terwusjudnya alam tanpa sampah plastik pada tahun 2030. Inisiatif ini merangkul pemerintah kota untuk bergabung dengan program Plastic Smart Cities dan membuat kebijakan pengelolaan sampah ditingkat kota, mengajak pengusaha untuk menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR), serta mengajak masyarakat untuk mengelola dan mendapat keuntungan dari sampah melalui ekonomi sirkular.

Studi kasus yang dipilih peneliti yaitu Pulau Mapur, pulau ini merupakan salah satu pulau terluar di perbatasan wilayah Bintan, Kepulauan Riau dan Pulau Mapur yang memiliki permasalahan terkait sampah di laut atau yang disebut Marine Debris.

Penulis sendiri telah terjun langsung ke lokasi dan melihat bahwa banyak sampah yang bertebaran di lingkungan rumah masyarakat baik itu bersumber dari daratan maupun lautan, terlihat juga bahwa kesadaran masyarakat Pulau Mapur dalam menjaga kebersihan lingkungan di daerah pesisir masih rendah sehingga mereka tidak terlalu menjaga dengan baik lingkungan daerah tempat tinggal mereka yang dimana jika itu terus berlanjut maka akan berdampak pada makhluk hidup yang berada di lautan maupun daratan. Selain itu penulis juga tertarik mengetahui bagaimana penerapan ASEAN Cooperation on Coastal Marine Environment pada wilayah perbatasan, Asia Tenggara adalah wilayah yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah; namun, situasi banyak sumber lingkungan saat ini berada dalam tahap kerusakan. Menurut ASEAN 4th State of the Environment Report (2009), Asia Tenggara memiliki salah satu tingkat deforestasi tercepat di dunia (sekitar 1,11 persen dari rata-rata global 0,16 persen per tahun); kawasan

bakau berkurang sebesar 18 persen antara tahun 1980 dan 2005. Laporan yang sama menunjukkan bahwa sekitar 88 persen terumbu karang terancam oleh aktivitas manusia, tingginya volume perdagangan satwa liar ilegal dapat menghapus antara 13 dan 42 persen dari spesies tumbuhan dan hewan di kawasan ini pada abad ini, sebagian besar sungai utama di kawasan itu dilaporkan tercemar; stok ikan laut turun hingga 50 persen; tingkat polusi udara di kota-kota Asia Tenggara termasuk yang tertinggi di dunia, dan pembakaran vegetasi yang terkait dengan pertanian sering menyebar dan menciptakan polusi asap lintas batas yang serius yang mempengaruhi orang-orang di wilayah yang luas. Wilayah ini juga terancam oleh akibat perubahan iklim seperti naiknya permukaan air laut, tren penurunan curah hujan dan munculnya berbagai bencana alam.

Karena sebagian besar negara Asia Tenggara (kecuali Singapura) adalah negara berkembang dan masih ada persentase tinggi penduduk yang hidup dalam kemiskinan dan bergantung pada pertanian dan perikanan, ketegangan yang dihasilkan antara pembangunan ekonomi, mempertahankan mata pencaharian dasar masyarakat miskin pedesaan dan perlindungan lingkungan adalah masalah serius bagi negara-negara ASEAN. Secara khusus, bagaimana mempromosikan pembangunan berkelanjutan sumber daya alam, mencegah atau mengurangi dampak berbahaya polusi lintas batas dan menyelesaikan perselisihan lingkungan merupakan tantangan utama yang dihadapi ASEAN. Untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif, mekanisme kerja sama lingkungan ASEAN perlu lebih ditingkatkan. ASEAN sendiri adalah perhimpunan negara – negara Asia Tenggara didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dengan ditandatangani nya

deklarasi ASEAN (Bangkok Declaration) negara anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand dan Vietnam.

Gambar 1.1 Strategi Prioritas ASEAN

Sumber : *ASEAN Cooperation on Environment – At A Glance*

Menurut ASEAN Cooperation on Coastal and Marine Environment (2021) yang dipublikasikan di https://environment.asean.org/awgcme/ yang akan berjalan hingga tahun 2025, ASEAN telah mulai mengembangkan sejumlah strategi, termasuk untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC), yang mencakup peningkatan kualitas udara, perubahan iklim, dan pelestarian tanah dan air yang masih asli. Sederhananya, penulis ingin menggunakan deep ecology karena berkaitan dengan manusia yang hidup selaras dengan lingkungannya, baik di dalam dirinya sendiri maupun dengan orang lain, serta kehidupan sehari-hari di Bumi. Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap nilai-nilai yang dikandung oleh alam

itu sendiri adalah kandungan dalam konsep aliran ini, Marfai (2013). Teori deep ecology menyatakan bahwa manusia sebenarnya adalah produk dari lingkungan dan bukan hanya produk yang telah diekstraksi darinya.

Oleh sebab itu, penulis mengambil masalah terkait marine debris serta pengimplementasi ASEAN Cooperation on Coastal Marine Environment dalam penanganan permasalahan polusi lingkungan Marine Debris khususnya di wilayah perbatasan melalui pendekatan Deep Ecology. Dengan begitu, penulis akan meneliti marine debris yang ada di Pulau Mapur serta bagaimana ASEAN Cooperation on Coastal Marine Environment dalam menangani marine debris.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi ASEAN Cooperation on Coastal Marine Environment dalam menangani marine debris di wilayah perbatasan melalui pendekatan Deep Ecology?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana upaya ASEAN Cooperation on Coastal Marine Environment untuk menghilangkan sampah laut dari wilayah pesisir menggunakan Deep Ecology berjalan sesuai rencana, khususnya di Pulau Mapur, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1) Untuk mengetahui strategi ASEAN Cooperation on Coastal Marine Environment dalam menangani Marine Debris di wilayah perbatasan.
2) Untuk mengetahui apakah pendekatan Deep Ecology sudah berhasil

dalam menangani permasalahan marine debris di wilayah perbatasan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Menjadi wadah untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2) Dapat memperkaya referensi dan literatur sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang sejenis dikemudian hari.
3) Memberi masukan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan berbagai pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.